

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Estelita M. Tungka¹, Mauna Th. B Maramis², George M.V. Kawung³

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi*

E-mail: 1esterlitatungka1999@gmail.com, 2maunabeatrix@unsrat.ac.id, 3georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada data tahunan yang diperoleh dari periode 2005-2022, temuan penelitian menawarkan perspektif yang mendalam mengenai dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun ada peningkatan pada IPM, pengangguran, atau pertumbuhan ekonomi, belum tentu akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, potensi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut akan menurun. Secara keseluruhan, ketika dilihat bersama-sama, semua variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meski IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak signifikan secara individu, namun pengeluaran pemerintah memegang peran kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan dampak optimal dalam penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Sulawesi Utara.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Human Development Index (HDI), unemployment, economic growth, and government expenditure on the poverty rate in North Sulawesi Province. Using multiple linear regression analysis on annual data obtained from the period 2005-2022, the research findings offer an in-depth perspective on the dynamics of poverty in the region. Based on the analysis, it was found that HDI, unemployment, and economic growth have a positive but insignificant influence on the poverty rate. This means that even if there is an increase in HDI, unemployment, or economic growth, it will not necessarily have a significant impact in reducing poverty in North Sulawesi. Meanwhile, government expenditure has a negative and significant effect, indicating that the greater the government expenditure, the potential poverty rate in the province will decrease. Overall, when viewed together, all variables have a significant effect on poverty.

The conclusion of this study confirms that although HDI, unemployment, and economic growth do not have a significant impact individually, government spending plays a key role in poverty reduction efforts in North Sulawesi. Therefore, the allocation and use of the government budget needs special attention to have an optimal impact on poverty reduction.

Keywords: *Human Development Index, Unemployment, Economic Growth, Government Expenditure, Poverty, North Sulawesi.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi semua bangsa di dunia. Kemiskinan pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya

sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun non formal (Supriatna, 2000).

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tak pernah lepas dari masalah kemiskinan. Kenaikan angka kemiskinan di Sulawesi Utara disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan di Sulawesi Utara dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap masalah ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pengangguran hanyalah satu dari banyak aspek yang mempengaruhi kemiskinan, dan faktor-faktor lain seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah juga memiliki peran.

Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam mengentaskan kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Akan tetapi terlihat bahwa kemiskinan di perdesaan terkesan lebih sulit ditangani oleh pemerintah dibanding di perkotaan. Salah satu faktor penyebabnya kemungkinan disebabkan oleh karena pendidikan penduduk di perdesaan yang masih tertinggal sehingga usaha pemerintah untuk membangun sumber daya manusia untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan agak terkendala dan pilihan membangun sarana dan fasilitas akan memakan biaya yang cukup besar.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2022

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)
2005	201,4	9,79
2006	249,4	9,8
2007	250,1	9,81
2008	218,2	11,42
2009	210,1	9,8
2010	218,2	9,32
2011	194,7	9,59
2012	177,4	8,46
2013	201,1	7,63
2014	197,56	8,5
2015	208,54	8,26
2016	202,82	8,65
2017	198,88	8,34
2018	193,31	8,1
2019	191,7	7,8
2020	192,37	7,66
2021	196,35	7,62
2022	185,14	7,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2023

IPM dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Upaya pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dapat memiliki dampak positif terhadap mengurangi tingkat kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indicator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 bulan Februari tercatat sebesar 05,01 persen. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sendiri diartikan sebagai

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sulawesi Utara mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk penduduknya. Kurangnya peluang pekerjaan formal dan ketergantungan pada sektor pertanian atau sektor informal dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan negara yang mengalami kenaikan secara nasional agregatif ataupun peningkatan output dalam suatu periode tertentu. Makna lainnya dari pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam barang dan jasa dengan fisik sesuai pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang industri, jumlah sekolah, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sector jasa, serta bertambahnya produksi barang modal. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan optimal.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonominya guna kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Kondisi di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak yang menjadi pengangguran.

Pengeluaran pemerintah dapat meningkat karena berbagai alasan yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Beberapa alasan umum mengapa pengeluaran pemerintah bisa meningkat antara lain yaitu peningkatan kebutuhan public. Jumlah penduduk yang bertambah dan perubahan dalam struktur demografi dapat meningkatkan permintaan akan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Ini dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan ini.

Berdasarkan pembahasan diatas, kendala dan kebijakan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih dimiliki oleh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pengentasan kemiskinan sendiri masih menjadi suatu hal yang sangat kompleks dan menjadi proyek nasional yang harus dijalankan oleh setiap daerah. oleh karena itu, untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan sekaligus mengurangi masalah kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu, saya mengambil judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”.

Rumusan Masalah

1. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara?
5. Apakah faktor indeks pembangunan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai studi indeks pembangunan manusia(IPM), pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.
2. Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk keefektifan kebijakan yang telah digunakan guna mengatasi kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Riyadi dan Deddy (2005), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Bintoro (2005), unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut : 1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana. 2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabelvariabel pembangunan dan implikasinya. 3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. 4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Sedangkan menurut Bachtiar Chamsyah (2006) menyatakan bahwa emiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. Menurut Mahbub ul Haq ahli pembangunan asal Pakistan yang menciptakan konsep IPM berpendapat bahwa pembangunan seharusnya berpusat pada manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. IPM mencakup tiga dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Teori Pengangguran

John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat kurangnya permintaan efektif di ekonomi. Ketika permintaan untuk barang dan jasa menurun, perusahaan mengurangi produksi dan memecat pekerja. Milton Friedman berpendapat tentang adanya 'pengangguran alamiah' yang terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut Sukirno (2008: 13), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

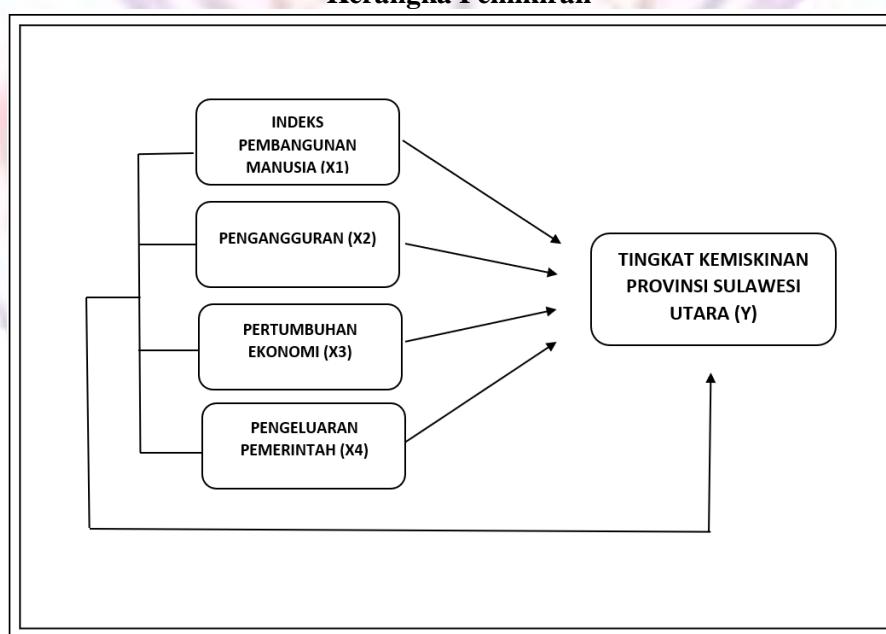
Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012: 57). Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011: 423)

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut David Ricardo: Teori "Efek Pengusiran" (crowding out) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi investasi swasta. Menurut John Maynard Keynes dalam teorinya, ia berpendapat bahwa dalam kondisi resesi, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Hipotesa penelitian

- Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat kemiskinan rendah, dan sebaliknya.
- Diduga Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pengangguran naik maka tingkat kemiskinan akan naik, dan sebaliknya.

3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemiskinan akan turun, dan sebaliknya.
4. Diduga Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pengeluaran pemerintah naik maka tingkat kemiskinan akan turun, dan sebaliknya.
5. Diduga IPM, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data Kuantitatif berupa data yang sudah diolah dan dipublikasi oleh instansi dan organisasi yang terkait. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai data penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kuantitatif bersifat dapat diukur dalam suatu skala numerik (Sugiono, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series dan cross-section tahun 2005-2022 yang bersumber dari instansi yang memiliki kaitan dengan masalah dan variabel dalam penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara..

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi utara. Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terbuka.

a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan manusia suatu negara atau wilayah. IPM dirancang oleh PNUD (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1990 sebagai alternatif terhadap ukuran ekonomi tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dengan fokus pada dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Data IPM Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan tahun 2005-2022.

b. Pengangguran (X2)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indicator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

c. Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output atau pertambahan pendapatan daerah aggregatif dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sektor produksi atas dasar harga konstan. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022 (dalam satuan persen).

d. Pengeluaran Pemerintah (X4)

Pengeluaran pemerintah adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara atau entitas pemerintah pada berbagai program, layanan, proyek, dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja pemerintah menurut pengeluaran provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi dan uji t. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n)$$

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4$$

Keterangan :

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variable Independen

X1 = Indeks Pembangunan Manusia

X2 = Pengangguran

X3 = Pertumbuhan ekonomi

X4 = Pengeluaran pemerintah

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2011: 97).

Uji Parsial (uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan regresi berganda adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sejumlah variabel bebas (independen) dengan satu atau lebih variabel terikat (dependen) dalam sebuah model regresi berganda. Tujuan dari uji simultan ini adalah untuk memeriksa apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat. Uji simultan ini berguna dalam mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi secara keseluruhan adalah signifikan.

Uji Asumsi

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik *normal probability Plot*. Pada pendekatan ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.

2. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Dengan kata lain multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. (Gujarati, 2005 : 157). Melalui pendekatan olahan data dengan Eviews maka gejala multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai VIF pada tabel Coefficients dimana jika nilai VIF lebih rendah dari 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas. Selain itu gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui Coefficient Correlations Matrix. Jika korelasi antara sesam variabel bebas lebih rendah dari 0,5 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variable bebas. (Santosa & Ashari, 2005 : 238 -240).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diuji menggunakan Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai p-value. Jika uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi < 0.05 maka model regresi masih terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda dan interpretasinya sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/15/23 Time: 22:46

Sample: 2005 2022

Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.572954	4.757325	0.751043	0.4660
X1	0.063722	0.084813	0.751324	0.4658
X2	1.39E-05	1.43E-05	0.968811	0.3503
X3	0.038500	0.085800	0.448720	0.6610
X4	-4.56E-10	2.32E-10	-1.967549	0.0708
R-squared	0.798553	Mean dependent var		8.656111
Adjusted R-squared	0.736569	S.D. dependent var		1.086273
S.E. of regression	0.557536	Akaike info criterion		1.899553
Sum squared resid	4.040999	Schwarz criterion		2.146878
Log likelihood	-12.09598	Hannan-Quinn criter.		1.933656
F-statistic	12.88325	Durbin-Watson stat		2.284464
Prob(F-statistic)	0.000186			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023

Berdasarkan hasil output diatas diperoleh persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 3,572954 + 0,063722 + 0,0000139 + 0,038500 - 0,000000000456 + e$$

Dengan : Y = Persentase Kemiskinan

 X1= IPM

 X2= Jumlah Pengangguran

 X3=Pertumbuhan Ekonomi

 X4=Realisasi Belanja Pemerintah

Berdasarkan persamaan regresi diatas, analisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen, yaitu :

1. Hasil persamaan dari Tabel dapat diterjemahkan konstanta tingkat kemiskinan sebesar 3.572954 yang mengandung arti bahwa jika variabel IPM (X1), pengangguran (X2), pertumbuhan ekonomi(X3), dan pengeluaran pemerintah sama dengan 0, maka tingkat kemiskinan adalah sebesar 3.572954.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara IPM terhadap tingkat kemiskinan. Artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien IPM (X1) yaitu sebesar 0.063722 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel IPM (X1) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.063722, dan sebaliknya.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pengangguran (X2) yaitu sebesar 1.39E-05 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel pengangguran (X2) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 1.39E-05, dan sebaliknya.
4. Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X3) yaitu sebesar 0.038500 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel

pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.038500, dan sebaliknya.

5. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah (X4) yaitu sebesar $-4.56E-10$ berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar $-4.56E-10$, dan sebaliknya.

Hasil Uji t (Parsial)

- a. t hitung variabel IPM (X1)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,4658 > 0,10$ dan nilai t hitung $0,751 < t$ tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

- b. t hitung variabel Pengangguran (X2)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,3503 > 0,10$ dan nilai t hitung $0,9688 < t$ tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

- c. t hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,6610 > 0,10$ dan nilai t hitung $0,448 < t$ tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

- d. t hitung variabel Pengeluaran Pemerintah (X4)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar $0,0708 > 0,10$ dan nilai t hitung $1,967549 > t$ tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Hasil Uji f (Simultan)

Hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan nilai sig $0,000186 > 0,10$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau koefisien determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji R^2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Koefisien Determinasi (R^2)

R-Squared	Adjusted R-Squared
0,798553	0,736569

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023

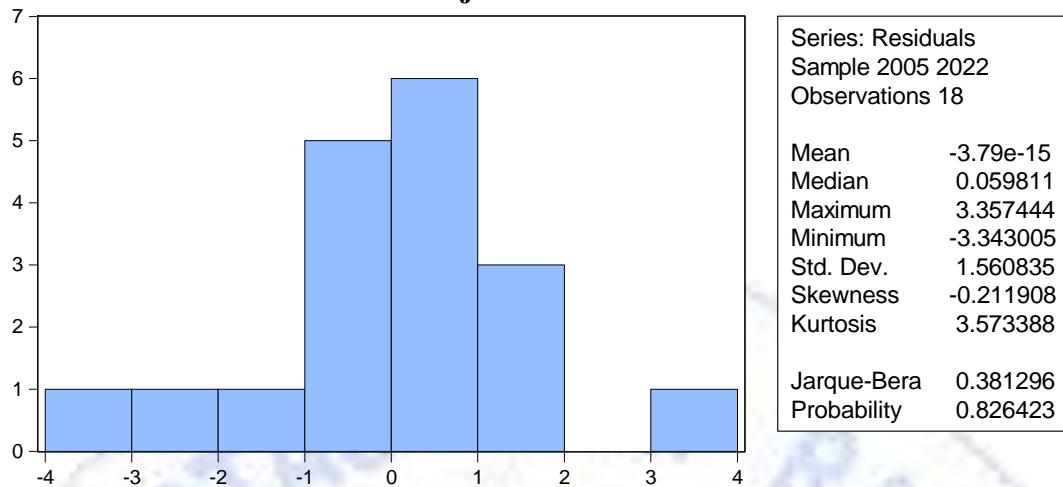
Hasil uji R^2 atau koefisien determinasi yaitu nilai Adjusted R Square sebesar 0,736569 menunjukkan bahwa kontribusi IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 74% ($0,74 \times 100\%$). Sisanya sebesar 26% ($100\% - 74\%$) dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependent, variable independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal.

Gambar 2
Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,826 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas penelitian bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independent.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 10/16/23 Time: 01:17

Sample: 2005 2022

Included observations: 18

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
		VIF	VIF
C	22.63214	1310.547	NA
X1	0.007193	2165.544	2.370416
X2	2.05E-10	114.4150	5.839796
X3	0.007362	17.31110	1.964758
X4	5.38E-20	22.67795	5.663377

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dapat dilihat pada table diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari angka 10. Ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai p-value. Jika uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi < 0.05 maka model regresi masih terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.922792	Prob. F(2,10)	0.4288
Obs*R-squared	2.648661	Prob. Chi-Square(2)	0.2660

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dapat dilihat pada table diatas, nilai probability Obs*R-squared memiliki nilai sebesar 0,2660 ($>0,05$) maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.562398	Prob. F(4,13)	0.2425
Obs*R-squared	5.843898	Prob. Chi-Square(4)	0.2111
Scaled explained SS	5.660826	Prob. Chi-Square(4)	0.2260

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser, probability Obs*R-squared $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel IPM adalah 0,0637. Hal ini dapat diartikan bahwa jika IPM naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 6,4% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah & Tia Ratu Gandasari yang berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten" juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusdi yang berjudul "Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan" mendapatkan hasil IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya IPM di provinsi Sulawesi Utara tidak menjamin bahwa tingkat kemiskinan akan berkurang.

IPM memperhitungkan tiga dimensi utama, yaitu: kesehatan (harapan hidup saat lahir), pendidikan (lamanya waktu yang diharapkan untuk sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan

standar hidup (Pendapatan Nasional Bruto per kapita, PPP). Sebagai indikator pembangunan, IPM yang tinggi umumnya mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik dan akses pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan. Namun, strategi dan kebijakan yang tepat perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pengangguran adalah 1,39. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pengangguran naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 139% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Meinny Kolibu yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara” juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Reksi Angga Irawan yang berjudul “ Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara” memiliki hasil pola hubungan antara variabel tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan adalah linear-linear. Dengan demikian hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu sosial ekonomi yang saling berkaitan.

Provinsi Sulawesi Utara, seperti halnya di berbagai wilayah lainnya di dunia, kenaikan tingkat pengangguran dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Pengangguran juga menyebabkan Kehilangan Pendapatan. Tanpa pendapatan tetap, banyak keluarga akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang dapat mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Dengan meningkatnya pengangguran, daya beli masyarakat berkurang. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan kehilangan keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,0385. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 3,8% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Feliks Arfid Guampe, Abdi Sakti Walenta, Fredrik Bastian Kawani dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021” juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Pangkiro, 2016) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum dapat menyelesaikan peningkatan kemiskinan yang terjadi. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam output atau produk domestik bruto (PDB) suatu negara, hal tersebut tidak selalu berarti akan ada penurunan tingkat kemiskinan.

Beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi bisa disertai dengan peningkatan kemiskinan antara lain adalah ketidaksetaraan pendapatan. Jika manfaat pertumbuhan ekonomi

hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar lainnya tidak merasakan manfaat tersebut, maka ketidaksetaraan pendapatan akan meningkat. Ini dapat menyebabkan tingkat kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat. Struktur perekonomian juga salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi. Beberapa sektor mungkin tumbuh dengan cepat, sementara sektor lain mungkin stagnan atau bahkan menyusut. Jika sektor yang tumbuh cepat tidak menciptakan banyak lapangan kerja atau sektor-sektor dengan pekerjaan berupah rendah mengalami kontraksi, hal ini bisa meningkatkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi merata dan inklusif, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah adalah -4.56. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Narka Suda Pratama dan Made Suyana Utama yang berjudul "Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali" juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini tergantung pada bagaimana, di mana, dan kepada siapa pengeluaran tersebut dialokasikan. Salah satu cara pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas dasar lainnya, dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar, pekerjaan, dan sumber daya lainnya, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di Sulawesi Utara harus terus diarahkan dan dikelola dengan baik karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat provinsi Sulawesi Utara.

5. Pengaruh secara Bersama-sama

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama. Ini berarti bahwa, berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, ada hubungan yang kuat antara semua variabel independent terhadap tingkat kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi melalui badan-badannya agar dapat lebih memperhatikan sector yang menyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM agar dapat mengurangi pengangguran.
2. Pemerintah harus mengkaji kembali dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pertumbuhan yang inklusif. Hal ini berarti manfaat pertumbuhan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, *Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara tahun 2005-2022*.**
- Bintoro, Tjokromidjojo** (2003), *Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara*, Jakarta.
- Chamsyah Bachtiar** (2006), *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, RM-Books, Jakarta.
- Feliks Arfid Guampe** (2022), *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021*.
- Ghozali, Imam** (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*
- Jhingan, M. L** (2012), *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolibu, Meinny** (2017), *Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Narka Suda Pratama, I Made Suyana Utama** (2019), *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali*
- Pangkiro, Henny** (2016), *Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara*.
- Reksi Angga Irawan** (2022), *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara*.
- Riyadi dan Deddy** (2005) *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT.
- Sayifullah, Gandasari T.R** (2016), *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*.
- Sugiyono** (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono** (2011), *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sumedi dan Supardi** (2004), “Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi” *Icaserd Working Paper No.21, PUsat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian, Agustus 2011*, Bogor.
- Tjahja Supriatna** (2000), *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.